

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan upaya secara sadar dan sungguh-sungguh yang bertujuan untuk mengubah manusia dengan segala potensi yang dimiliki agar menjadi berkualitas dan bermanfaat (Triyono dan Mufarohah, 2018: 1-2). Pendidikan juga merupakan aspek penting dalam pembangunan suatu negara, karena pembangunan tidak hanya menekankan pada aspek ekonomi, namun juga harus mulai berfokus pada pembangunan sumber daya manusia yang handal dan terampil dalam menghadapi tantangan penguasaan sains dan teknologi. Dalam upaya menjadikan sumber daya manusia yang handal dan terampil, perlu dilakukan pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan melalui program pendidikan nasional. Hal ini dikarenakan penggerak utama pembangunan nasional adalah produk pendidikan, maka program pendidikan yang tepat sasaran harus dijadikan prioritas dalam pembangunan nasional (Ali, 2009: 1).

Salah satu upaya pemerintah dalam dunia pendidikan untuk mewujudkan adanya pembangunan nasional adalah program wajib belajar 12 tahun. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar (PIP) Pasal 2 yang bertujuan untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah. Melalui program ini, pemerintah berusaha untuk mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan

akibat kesulitan ekonomi, sehingga siswa dan siswi setelah lulus jenjang pendidikan dasar dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Terutama siswa-siswi yang duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sehingga dapat mencetak generasi muda yang berkualitas.

Program wajib belajar 12 tahun ini menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan berita dalam Tribun Jogja.com pada tanggal 2 Maret 2018, Bupati Gunungkidul menyatakan bahwa masih banyak anak di Kabupaten Gunungkidul tidak memenuhi lama sekolah yang ditentukan, dikarenakan permasalahan ekonomi, sehingga lebih memilih untuk bekerja dan tidak melanjutkan pendidikannya. Hal ini ditunjukkan dengan angka putus sekolah di Kabupaten Gunungkidul yang masih terbilang cukup tinggi. Berdasarkan data yang didapatkan dalam Tribun Jogja.com pada bulan Maret 2018, untuk SMP, angka putus sekolah mencapai 3% atau 810 dari 27.000 anak. Hal ini tentunya dipicu karena faktor ekonomi masyarakat sekitar. Menurut Kepala Disdikpora Kabupaten Gunungkidul, Bahron Rasyid, selain faktor ekonomi juga terdapat pengaruh dari lingkungan sekitar yang mendorong siswa-siswi malas melanjutkan sekolah.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah melakukan sejumlah upaya untuk menekan angka putus sekolah. Upaya yang dilakukan salah satunya yaitu pemberian beasiswa untuk anak-anak berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu. Selain itu, Kepala Balai Pendidikan Menengah (Dikmen), Gunungkidul, Sukito, mengatakan para siswa juga akan lebih diarahkan untuk bersekolah ke SMK

sehingga mereka dapat memiliki kompetensi setelah lulus sekolah, dan bisa langsung bekerja (<http://jogja.tribunnews.com>).

Program wajib belajar 12 tahun juga membutuhkan kesiapan pemerintah dalam hal ketersediaan biaya yang diperlukan. Pembiayaan pendidikan menjadi permasalahan penting dalam pembangunan pendidikan yang ada. Berdasarkan penelitian Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) tentang anggaran pendidikan yang adil pada program wajib belajar 12 tahun, yang dipublikasikan pada 30 Maret 2017, menunjukkan belum adanya prioritas pemerintah daerah terhadap program tersebut. Penelitian yang dilakukan di dua puluh kabupaten/kota, salah satunya yaitu Kabupaten Gunungkidul, menunjukkan belum maksimalnya pengalokasian dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mereka untuk menjalankan program tersebut. Dana murni yang berasal dari daerah tidak sampai 20% dialokasikan untuk pendidikan, sebagian besar hanya menganggarkan sekitar 10% (<https://news.detik.com>). Kabupaten Gunungkidul sendiri hanya mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 15,4% pada tahun 2017, 12,31% pada tahun 2018, dan 10,6% pada tahun 2019 (<https://npd.kemdikbud.go.id>). Hal ini tentunya tidak sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 Ayat (1) yang menyatakan bahwa dana pendidikan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD (<https://kelembagaan.ristekdikti.go.id>). Maka, permasalahan inilah yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Ketersediaan biaya menjadi kebutuhan yang utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam pengelolaan biaya pendidikan yang menjadi tantangan adalah pemenuhan kebutuhan pendidikan yang bermutu, namun dengan biaya yang terjangkau. Menurut Bastian (2007: 136), perhitungan biaya satuan (*unit cost*) pendidikan di sekolah dasar dan menengah masih sederhana dan belum mampu mengungkapkan informasi sebagai landasan dalam pengambilan keputusan. Perhitungan biaya yang dilakukan belum mampu memberikan data informatif, terkait dengan biaya pendidikan setiap siswa yang disebut dengan biaya satuan pendidikan (*unit cost*). Analisis penentuan biaya satuan (*unit cost*) ini tentunya sangat penting bagi perencanaan pendidikan. Lembaga pendidikan juga memerlukan informasi biaya satuan pendidikan, sebagai dasar bagi pihak manajemen sekolah dalam mengalokasikan sumber ekonomi berupa dana yang ada (Bastian, 2007: 148).

Dalam melakukan perhitungan biaya satuan pendidikan terdapat dua cara yang dapat digunakan, yaitu perhitungan biaya secara tradisional dan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas (*Activity Based Costing*). Sistem akuntansi biaya tradisional adalah sistem yang menempatkan fokus perhitungan pada *output* yang dihasilkan. Dengan sistem akuntansi biaya tradisional pembebanan biaya *overhead* pada setiap siswa secara merata, karena perhitungannya hanya menggunakan dasar pembebanan biaya atau *driver* berbasis unit. Pembebanan biaya *overhead* secara merata tersebut akan menimbulkan distorsi dalam perhitungan biaya satuan pendidikan. Sedangkan, metode *Activity Based Costing* (ABC) dapat mengendalikan biaya melalui penyediaan informasi tentang aktivitas yang menjadi

penyebab timbulnya biaya. Penerapan ABC di dalam organisasi pendidikan akan lebih fokus kepada pelayanan aktivitas yang diberikan, sehingga penerapannya dapat digunakan oleh sekolah untuk menentukan biaya yang dibebankan kepada setiap siswa yang didasarkan atas aktivitas yang dilaksanakan. Hal ini tentunya sesuai jika diterapkan pada perhitungan biaya pendidikan di sekolah menengah kejuruan (Bastian, 2015: 350).

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan bentuk pendidikan menengah yang bertujuan membuat peserta didik memiliki keahlian khusus dan siap bekerja pada bidang tertentu sesuai dengan kompetensi yang diambil saat mengenyam pendidikan di SMK. SMK Negeri 3 Wonosari merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan yang memiliki lima kompetensi keahlian, yaitu Teknik Elektronika Industri, Teknik Audio Video, Teknik Mekatronika, Jasa Boga/Kuliner, dan Akomodasi Perhotelan. Aktivitas yang dilakukan oleh setiap siswa pada setiap kompetensi keahlian tentunya sangat beragam. Keberagaman ini dikarenakan terdapat perbedaan pembelajaran dan praktik pada setiap kompetensi keahlian, dan perbedaan di setiap jenjang kelas yang ada. Aktivitas yang beragam menyebabkan adanya perbedaan jumlah dana pendidikan pada setiap siswa.

Dengan adanya perbedaan jumlah dana pendidikan setiap siswa, peneliti beranggapan bahwa analisis terkait biaya yang dikeluarkan untuk membiayai aktivitas-aktivitas yang beragam itu perlu dilakukan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menerapkan perhitungan biaya satuan menggunakan metode *Activity Based Costing* (ABC) untuk menentukan *unit cost* pendidikan per siswa per tingkat per kompetensi keahlian di SMK Negeri 3 Wonosari. Diharapkan melalui

perhitungan tersebut, dapat diukur biaya layanan pendidikan dengan melakukan penelusuran tidak hanya pada seluruh siswa, namun lebih kepada tiap unit siswa dari masing-masing tingkat dan paket keahlian yang ada. Analisis ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan menengah khususnya pada sekolah menengah kejuruan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, maupun pihak pengelola sekolah itu sendiri.

1.2. Rumusan Masalah

SMK merupakan satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan berbagai paket keahlian yang ada pada jenjang pendidikan menengah (Asmoni, 2018: 2). Dengan adanya berbagai paket keahlian yang ditawarkan, tentunya aktivitas yang dilakukan oleh setiap siswa pada setiap kompetensi keahlian sangat beragam. Aktivitas yang beragam menyebabkan adanya perbedaan jumlah dana pendidikan pada setiap siswa. Maka, diperlukan suatu perhitungan sehingga dapat mengetahui biaya pendidikan berdasarkan aktivitas yang dilakukan setiap siswa sesuai dengan kompetensi keahlian yang ada. Penerapan *Activity Based Costing* di dalam organisasi pendidikan dapat digunakan oleh sekolah untuk menentukan biaya yang dibebankan kepada setiap siswa yang didasarkan atas aktivitas yang dilaksanakan, tentunya ini sesuai jika diterapkan pada perhitungan biaya pendidikan di sekolah menengah kejuruan (Bastian, 2015: 350). Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah berapa biaya satuan (*unit cost*) pendidikan per siswa per tingkat per kompetensi

keahlian per tahun di SMK Negeri 3 Wonosari yang dihitung dengan menggunakan metode *Activity Based Costing* (ABC)?

1.3. Batasan Masalah

Penelitian ini memberikan batasan masalah yaitu penelitian difokuskan kepada biaya satuan (*unit cost*) pendidikan di SMK Negeri 3 Wonosari untuk Tahun Ajaran 2018/2019.

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya biaya satuan (*unit cost*) pendidikan per siswa per tingkat per kompetensi keahlian per tahun di SMK Negeri 3 Wonosari pada tahun ajaran 2018/2019 yang dihitung dengan menggunakan metode *Activity Based Costing* (ABC).

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan acuan dan bahan pertimbangan bagi pihak sekolah dalam pengambilan keputusan terkait pengalokasian dana pendidikan dan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
2. Memberikan referensi bagi advisi lain untuk penelitian selanjutnya terkait dengan perhitungan biaya satuan (*unit cost*) pendidikan per siswa per tingkat per kompetensi keahlian di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menggunakan *Activity Based Costing* (ABC).

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah SMK Negeri 3 Wonosari, yang beralamat di Jalan Pramuka, Tawarsari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.6.2. Data yang Dibutuhkan

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Menurut Sekaran dan Bougie (2013:130), data primer mengacu pada informasi yang diperoleh langsung (dari tangan pertama) oleh peneliti terkait dengan variabel ketertarikan untuk tujuan tertentu dari studi. Dalam penelitian ini data primer berupa hasil wawancara dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah sarana dan prasarana, dan wakil kepala sekolah kesiswaan. Hasil wawancara tersebut mengenai pelaksanaan manajemen keuangan sekolah, sumber pendanaan sekolah, pihak yang terlibat dalam manajemen keuangan sekolah, pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), pengalokasian dana ke aktivitas, perhitungan biaya yang dilakukan sekolah, dan sistem pelaporan keuangan dan pengawasan yang dilakukan oleh sekolah.

2. Data Sekunder

Menurut Sekaran dan Bougie (2013: 130), data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada. Dalam penelitian ini data sekunder berupa RAPBS Tahun Ajaran 2018/2019, data jumlah peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dan kalender akademik Tahun Ajaran 2018/2019.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data ini, sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data melalui komunikasi dua arah untuk mendapatkan data (Hartono, 2017: 114). Dari wawancara ini akan didapatkan informasi mengenai proses dan pihak yang terlibat dalam manajemen keuangan di SMK Negeri 3 Wonosari, proses pelaksanaan penyusunan RAPBS, sumber dana pembiayaan yang didapatkan sekolah dan pengalokasian dana tersebut, pihak yang mengelola dana sekolah selama satu tahun anggaran, perhitungan biaya pendidikan yang dilakukan sekolah, serta sistem pelaporan dan pengawasan keuangan yang diterapkan sekolah.
2. Dokumentasi, yaitu cara untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk arsip, dokumen, tulisan angka, atau gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian (Sugiyono, 2017: 329). Dari dokumentasi ini akan diperoleh data RAPBS Tahun Ajaran

2018/2019, data jumlah peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dan kalender akademik Tahun Ajaran 2018/2019.

1.6.4. Rencana Metode Analisis Data

Langkah-langkah analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Pengidentifikasian Aktivitas

Aktivitas tersebut akan digolongkan menjadi aktivitas utama dan aktivitas penunjang, serta digolongkan sesuai dengan karakteristik masing-masing aktivitas (*result producing activities*, *result contributing activities*, dan *support activities*).

2. Melakukan Pembebanan Biaya ke Aktivitas

Biaya yang dikeluarkan untuk membiayai seluruh aktivitas pada tahap ini akan diidentifikasi, apakah biaya tersebut termasuk dalam biaya langsung (*direct cost*) atau biaya tidak langsung (*indirect cost*). Pengklasifikasian biaya ini dilakukan untuk mempermudah penentuan metode yang digunakan untuk membebankan biaya ke aktivitas. Pembebanan biaya ke aktivitas dapat dilakukan melalui *direct tracing*, *driver tracing*, dan *allocation*.

3. Pembebanan Biaya Lain ke Aktivitas

Biaya yang belum termasuk dalam RAPBS, karena tercantum di dalam dokumen pendukung lainnya, dan termasuk dalam biaya yang

dikeluarkan untuk kebutuhan penyelenggaraan pendidikan juga dibebankan ke aktivitas yang ada.

4. Pembebanan Biaya ke Aktivitas Utama

Seluruh biaya yang sudah dialokasikan ke masing-masing aktivitas penunjang, kemudian akan dialokasikan ke aktivitas utama.

5. Merekapitulasi Biaya Aktivitas Utama

Setelah seluruh biaya dialokasikan ke masing-masing aktivitas penunjang, dan didapatkan pembebanan akhir kepada dua aktivitas utama, maka total biaya pada aktivitas utama dapat dihitung, untuk nantinya akan dipergunakan dalam perhitungan di langkah selanjutnya.

6. Mengelompokkan Biaya Aktivitas Utama dalam *Activity Cost Pool*

Seluruh biaya yang telah dialokasikan ke dalam aktivitas utama akan diidentifikasi kembali untuk mempermudah pembebanannya ke masing-masing tingkat dan kompetensi keahlian untuk memperoleh *driver* yang tepat. Biaya yang memiliki karakteristik dan driver yang sama akan dikelompokkan ke dalam *activity cost pool* untuk mempermudah perhitungan biaya satuan (*unit cost*) pendidikannya.

7. Identifikasi *Cost Driver* dan Perhitungan Tarif *Cost Driver*

Kemudian dilakukan pengidentifikasian *activity driver*, misalnya jumlah rombongan belajar, jumlah siswa, jumlah jam pelajaran, untuk setiap aktivitas yang menyerap biaya penuh untuk menghubungkan aktivitas ke *cost object* yang dikonsumsinya. Pembebanan biaya ke *cost*

object akan dilakukan secara penuh sesuai dengan besarnya biaya yang dikonsumsi melalui *activity driver*.

8. Penentuan *Unit Cost* Pendidikan Siswa Per Tingkat Per Kompetensi Keahlian Berdasarkan *Activity Based Costing*

Dalam tahap ini, seluruh biaya yang telah dikumpulkan berdasarkan aktivitas akan dialokasikan untuk mendapatkan biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing kompetensi keahlian dengan menggunakan tarif per unit *cost driver* yang telah dihitung sebelumnya. Kemudian, jumlah biaya yang telah terkumpul untuk tiap kompetensi keahlian digunakan untuk menghitung jumlah *unit cost* per siswa per kompetensi keahlian per tahun di SMK Negeri 3 Wonosari.

